



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 362 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENATALAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERSTANDAR
PADA PENDERITA HIPERTENSI PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab terhadap peningkatan kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui program-program pencegahan dan pengendalian penyakit yang fokusnya pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan koordinasi sesuai norma, standar, pedoman dan kriteria pemahaman yang sama agar program pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dilaksanakan secara akurat dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelaksanaan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar Pada Penderita Hipertensi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 457/MENKES/SK/V/2008 tentang Penetapan Indikator Pencapaian 17 Sasaran *Grand Strategy* Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PENATALAKSANAAN PELAYANAN PENYAKIT TIDAK MENULAR SECARA TERPADU (PANDU PTM) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Pelaksanaan Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM) Program Upaya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (PTMKJN).

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Biaya dalam pelaksanaan Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 005/DPA/2021 tanggal 4 Januari 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 362 Tahun 2021
Tanggal 10 Mei 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN PENATALAKSANAAN PELAYANAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR SECARA TERPADU (PANDU PTM) PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : dr. Widyastuti, MKM
2. Penanggungjawab : dr. Dwi Oktavia T.L. Handayani , M. Epid
3. Ketua : dr. Endang Sri Wahyuningsih, MKM
4. Sekretaris : dr. Rebekka
4. Bendahara : Rizka Utami, SE
5. Anggota : dr. Novita Suprpto Wati
dr. Radhiana Purisanti
dr. Yenny Suwito
dr. Affan Nurrochman
Luh Ayu Anggraini,A.Md.Kep.

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001